



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT JAKARTA TOURISINDO
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H ZULFARSHAH, SE.MM
2. Jabatan : DIREKTUR ADM DAN KEUANGAN
3. NHK : 165455

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 8.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/300 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, Rp. 4.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 401 m2/350 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 625.000.000

1. MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
2. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 2016, LAINNYA Rp. 300.000.000
3. MOBIL, MAZDA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. MOTOR, BENELLI SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 880.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 651.683.506

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 10.156.683.506

III. HUTANG Rp. 180.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

9.976.683.506

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.